

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI
PENGADILAN NEGERI SUMENEP

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

DWI FITRA AFANDANI
NPM. 0971010073

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI
SUMENEP

Disusun oleh :

DWI FITRA AFANDANI
NPM. 0971010073

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tim Penguji :

1. H. Sutrisno, SH., M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. : (.....)
NPT. 3 8202 07 0221
3. Yana Indawati, SH., M.Kn. : (.....)
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN
PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP

Disusun oleh :

DWI FITRA AFANDANI
NPM. 0971010073

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 18 Mei 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001
2.

Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221
3.

Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI
SUMENEP

Disusun oleh :

DWI FITRA AFANDANI
NPM. 0971010073

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing

Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
Dekan

Haryo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Di sini penulis mengambil judul “Penerapan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Sumenep”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sumenep.
3. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Gendut Sukarno, Ms selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang penulis hormati tidak pernah lelah untuk membimbing penulis sampai Skripsi ini selesai.
7. Bapak Moh. Haris, S.H., selaku pembimbing di Pengadilan Negeri Sumenep yang telah banyak membantu.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

9. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak Sariyanto, S.Sos., dan seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Seluruh staf Pengadilan Negeri Sumenep yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas kerjasama dalam pelaksanaan penelitian.
12. Orang tuaku H. Erfan Sadik dan Hj. Siti Aminah serta keluarga besarku tersayang yang telah memberikan seluruh bantuan, dukungan dan doa kepada penulis.
13. Teman-teman mahasiswa/i khususnya angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
14. Nancy Oktaviana Yolandany serta keluarga besarnya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pertambangan	
1.5.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan.....	7
1.5.1.2 Sumber-Sumber Hukum Pertambangan.....	9
1.5.1.3 Asas-Asas Pertambangan	11
1.5.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir	
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana	13

1.5.2.2	Macam-macam Tindak Pidana	14
1.5.2.4	Pengertian Tindak Pidana Penambangan Pasir.....	18
1.5.3	Tinjauan tentang Pidana Denda	
1.5.3.1	Pengertian Pidana.....	20
1.5.3.2	Jenis-Jenis Pidana.....	21
1.5.3.3	Pengertian Pidana Denda	22
1.5.3.4	Kelemahan dan Keuntungan Pidana Denda	25
1.5.3.5	Pengaturan Pidana Denda di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan di Dalam Peraturan Daerah	26
1.5.4	Tinjauan tentang Pemidanaan	
1.5.4.1	Pengertian Pemidanaan	28
1.5.4.2	Teori-teori Pemidanaan	29
1.5.4.3	Tujuan Pemidanaan	31
1.6	Metode Penelitian	
1.6.1	Jenis Penelitian.....	32
1.6.2	Data.....	34
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	36
1.6.4	Metode Pengolahan & Analisis Data.....	38
1.6.5	Lokasi Penelitian	40
1.6.6	Sistematika Penulisan	40
 BAB II BENTUK PENGATURAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN		
2.1	Dasar Hukum Mengenai Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin	43

2.2 Pelaksanaan Penambangan Pasir di Kabupaten Sumenep	47
2.3 Analisa Mengenai Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin.....	52
 BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP	
3.1 Identifikasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Perkara Penambangan Pasir Tanpa Izin.....	57
1. Putusan Perk. No. 04/Pid. C/2011/ Pn. Smp.....	57
2. Putusan Perk. No. 07/Pid. C/2012/Pn. Smp	59
3. Putusan Perk. No. 18/Pid. C/2012/Pn. Smp	61
4. Putusan Perk. No. 19/Pid. C/2012/Pn. Smp	64
3.2 Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Perkara Penambangan Pasir Tanpa Izin.....	65
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Dwi Fitra Afandani
NPM : 0971010073
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 19 April 1991
Program Studi : Srata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI
SUMENEP

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana denda terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin di Pengadilan Negeri Sumenep, dimana hal tersebut bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk pengaturan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin selain melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, juga melihat pertimbangan hakim yakni melihat posisi kasusnya seperti apa, sikapnya terdakwa gimana, dan kembali keyakinan hakim apakah harus dipenjara, mungkin hanya denda saja, atau karena masih coba-coba atau baru sekali maka hukuman percobaan saja.

Kata kunci : Penerapan, pidana denda, penambangan pasir tanpa izin

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka.¹

Pencemaran akan dapat dipecahkan dengan ongkos-ongkos yang timbul (price) dan merupakan masalah ekonomi saja. Menurut Dr. H.C. Coombs, We can reduce pollution if we are prepared to pay for it. Karena itu, masalah pencemaran adalah persoalan ekonomi, artinya berapa kemampuan kita membayarnya, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran antipollution maupun secara tak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran. Dr. H.C. Coombs memberikan argumentasi bahwa economics changes can solve many environmental problems. Mekanisme pasar dapat diterapkan mengatasi kelangkaan sumber daya alam yang bersifat ekonomis pada tingkat yang dikehendaki. Pencemaran dapat dikendalikan secara ekonomi,

¹Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 5

misalnya dengan pengaturan hukum seperti penerapan denda, pajak pada bahan yang diperoses atau limbahnya.²

Salah satu masalah yang tergolong isu nasional adalah mengenai penambangan pasir baik di pesisir pantai, laut, sungai maupun gunung di Indonesia. Penambangan pasir baik dengan izin maupun tanpa disertai izin di berbagai daerah di Indonesia yang tergolong semakin marak terjadi terutama di daerah yang potensial akan kandungan mineral. Salah satu kasus terbesar penambangan pasir di Indonesia yaitu penambangan pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau, yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak Tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu akibat aktifitas itu. Kerusakan ekosistem mengakibatkan populasi hewan laut menurun.³

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk kedalam bahan galian ini yaitu: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda; uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; nikel, kobalt; timah.

²M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, edisi revisi, Alumni, Bandung, 2001, h. 14.

³<http://jayatiunipdu.blogspot.com/2010/02/penambangan-pasir-di-kepulauan-riau.html>, diakses pada rabu tanggal 20 februari 2013 pukul 15.00 WIB

2. Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng; emas, platina, perak, air raksa, intan; arsin, antimon, bismut; ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya; berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; kriolit, fluorspar, barit; yodium, brom, khlor, belerang.
3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: Nitrata-nitrata, pospat-pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C mengatur mengenai setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah atau pejabat setempat yang berwenang tercantum pada Bab IV Pasal 4, 5 dan 6 pada perda tersebut. Bentuk Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut yakni para penambang yang hampir sebagian besar merupakan warga di sekitar daerah pertambangan pasir tersebut melakukan penambangan pasir maupun galian golongan C lainnya tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Menurut data dari Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara penambangan pasir tanpa izin, sejak Tahun 2010 sampai bulan Januari 2013 terjadi sebanyak 4 perkara. Pada Tahun 2010 sebanyak 1 perkara, Tahun 2011 tidak ada perkara, Tahun 2012 sebanyak 3 perkara dan sampai bulan Januari Tahun 2013 tidak ada perkara penambangan pasir tanpa izin.

Penambangan pasir merupakan mata pencaharian warga sekitar pertambangan pasir tersebut. Setiap hari masih terlihat beberapa penambangan

pasir liar di pesisir pantai desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan dan wilayah pesisir Ambunten.⁴ Penambangan pasir tersebut berdampak kerusakan lingkungan yang memprihatinkan. Masyarakat mengeluhkan akibat pertambangan pasir yang tidak terkontrol tersebut mulai dari rusaknya akses jalan disekitar lokasi penambangan karena dilalui truk-truk pengangkut pasir setiap hari, erosi tanah dan perubahan permukaan lahan (tanah) sampai sumur warga menjadi terasa payau serta rusaknya ekosistem laut di pesisir pantai.

Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat kebutuhan bahan galian golongan C seperti pasir, batuan desit, tanah urug, kapur dan sebagainya yang digunakan untuk keperluan konstruksi diambil dari sungai maupun pantai. Sebagian besar kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan dengan skala kecil dan tanpa memiliki izin. Kegiatan penambangan pasir tanpa izin tergolong tinggi terjadi, baik di pesisir pantai utara maupun selatan serta kepulauan di Kabupaten Sumenep. Keadaan demikian membuat pemerintah daerah sulit dalam mengawasi dan mengontrol kegiatannya, akibatnya banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut.

Meskipun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh

⁴<http://jatim.tribunnews.com/m/index.php/2012/11/26/penambangan-pasir-liar-di-sumenep->, diakses pada rabu tanggal 20 februari 2013 pukul 15.00 WIB

Pengadilan. Dalam hal yang demikian bukanlah berarti bahwa pidana denda berat akan menjamin efektivitas pembedanaan, akan tetapi diharapkan dalam penjatuhan pidana denda juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.

Berkaitan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Sumenep"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan tentang asas kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum.

- b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Jawa Timur
- c. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak penambangan pasir tanpa izin.

b. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

c. Bagi Pengadilan Negeri Sumenep

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pengadilan khususnya hakim sebagai kunci utama terwujudnya keadilan untuk dapat mengambil langkah – langkah dan kebijakan yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang ditimbulkan karena penambangan pasir tanpa izin.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pertambangan

1.5.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mining law, bahasa Belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan bergrecht.⁵ Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan.

Mining Laws is: “have been set up to protect the interest of the mining industry and to minimize the conflict between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interest”.

Artinya hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adanya hukum pertambangan tidak hanya untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum pertambangan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.⁶

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Mining Laws is: “also may provide a basis for

⁵ Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Cetakan Pertama, h. 12

⁶ Ibid

implementing some environmentally protective measure in relation to mining operation at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages”. Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi.⁷

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.⁸

Berdasarkan definisi diatas penulis lebih tertarik dengan pengertian hukum pertambangan oleh Joan Kuyek bahwa hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adanya hukum pertambangan tidak hanya untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum pertambangan untuk

⁷ Ibid, h. 13

⁸ Ibid, h. 14

melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan

1.5.1.2 Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

1. Sumber Hukum Pertambangan Yang Bersumber Dari Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Pertama kali negara Indonesia menggunakan peraturan pertambangan sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu Indische Mijnwet (Staatblaad 1899 No. 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II. Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama.

Setelah merdeka 15 tahun negara kita baru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (selanjutnya disingkat PERPU) No. 37 Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang-undang tersebut mencabut dan tidak memberlakukan lagi Indische Minjwet karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan.

Berselang lebih kurang tujuh tahun, PERPU No. 37 Tahun 1960 diganti dengan Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan alasan PERPU No. 37 Tahun 1960

tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan.⁹

Kemudian setelah berjalan lebih kurang 42 tahun, Undang-undang No. 11 Tahun 1967 diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara No. 4959. Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku sekarang adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2009.¹⁰ Undang-undang tersebut hanya mengatur pertambangan di bidang mineral dan batu bara. Sedangkan mengenai di bidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

2. Sumber Hukum Pertambangan Yang Bersumber Dari Hukum Yang Berlaku Di Negara Lain

Sumber hukum pertambangan bersumber dari hukum yang berlaku di negara asing, meliputi:

a. Mineral Resources Law of The People's Republic of China.

Mineral Resources Law of The People's Republic of China merupakan ketentuan yang ditetapkan yang oleh Pemerintah Cina pada tanggal 19 Maret 1986, dan mulai

⁹ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Cetakan Pertama, h. 4

¹⁰ Ibid, h. 5

berlaku efektif atas 7 chapter atau bab dan 50 pasal atau artikel.

- b. Japanese Mining Law No. 289, 20 December, 1950 Latest Amendment in 1962.

Japanese Mining Law merupakan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Jepang. Undang-undang ini ditetapkan pada 20 Desember 1950 dan kemudian diamandemen pada Tahun 1962. Undang-undang ini terdiri atas enam chapter atau bab dan terdiri atas 88 pasal.

- c. Philippine Mining Act of 1995.

Philippine Mining Act of 1995 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan di Philipina Act. ini diterapkan pada tanggal 3 Maret 1995. Act ini terdiri atas 20 chapter atau bab dan 116 pasal¹¹.

1.5.1.3 Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu telah ditetapkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan

¹¹ Salim HS, opcit, h.28-29

dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batu bara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan dengan dampaknya.¹²

2. Keberpihakan kepada kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.¹³

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

¹² Ibid, h.7

¹³ Ibid

Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepada Negara dan masyarakat.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.¹⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁵. Dari pengertian tersebut maka tujuannya adalah untuk mengatur tiap perilaku individu atau kelompok agar dapat hidup berdampingan sebagaimana disebut sebagai makhluk sosial sehingga dapat hidup bersama aman dan sejahtera, dan untuk mendidik orang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan

¹⁴ Ibid, h. 8

¹⁵ Isnu guandi dan jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memhami hukum pidana, jilid 1, prestasi pusta karya, 2011, Cetakan pertama, hal 40

dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁶

1.5.2.2 Macam-Macam Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku II hanya tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.¹⁷

Perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

¹⁶Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia, 2010, Cetakan Pertama, h. 49

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, Cetakan Kedelapan, h. 78

1. Delik dolus dan delik culpa

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.¹⁸

2. Delik commissionis dan delikta commissionis

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 164: mengetahui suatu pemufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

Ada pula yang dinamakan delikta commissionis *peromissionem commisa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak

¹⁸ Ibid, h. 82

berbuat. misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.¹⁹

3. Delik biasa dan delik yang dikualifikasi (dikhhususkan)

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain yaitu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi. Contoh: Pasal 362 adalah pencurian biasa, dan Pasal 363 adalah pencurian yang dikualifikasi, yaitu karena cara melakukannya di waktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya adalah hewan. Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan yang dikualifikasi, karena mungkin caranya objeknya, maupun akibatnya, adalah lebih khusus daripada dalam penganiayaan biasa.²⁰

4. Delik menerus dan tidak menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus keadaan yang berlangsung terus. misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah

¹⁹Ibid, h. 83

²⁰ Ibid, h. 83-84

(wederrechtelijke vrijheids-beroving). Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati.²¹

1.5.2.3 Pengertian Penambangan Pasir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk Golongan Galian C.

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Hanya beberapa tanaman yang dapat tumbuh di atas pasir, karena rongga-rongganya yang besar. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur Semen.²²

Berdasarkan kegunaannya, pasir bisa dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pasangan dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran.
2. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya.

²¹Ibid , h. 84

²²<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasir>, diakses pada hari selasa tanggal 5 februari 2013 pukul 17.00 WIB

3. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang atau menambangkan. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk menambang atau menggali pasir, baik pasir galian, sungai dan laut.

1.5.2.4 Pengertian Tindak Pidana Penambangan Pasir

Salah satu tindak pidana di bidang pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pemerintah. Salah satu contoh Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) yang mengatur mengenai setiap penambangan pasir harus memiliki izin adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 tentang izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin dari pemerintah atau pejabat

²³<http://idebangunan.blogspot.com/2012/08/jenisbeda-pasir-berdasarkan-kegunannya.html>, diakses pada hari selasa tanggal 5 februari 2013 pukul 06.30 WIB.

setempat yang berwenang tercantum pada Bab IV Pasal 4, 5 dan 6 pada perda tersebut.

Pasal 4:

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati; (2) Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Eksploitasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Pengolahan dan atau Pemurnian.

Pasal 5:

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Koperasi
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan bergerak dibidang pertambangan
 - e. Perorangan yang berkwarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di Daerah tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C
 - f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan Usaha dan atau perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, e.

Pasal 6:

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SPID); (2) Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian; (3) Dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dimaksud pada ayat (1) dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah; (4) Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Pertambangan Daerah.

Adapun ancaman pidana terhadap penambangan pasir yang tidak mempunyai izin atau tidak memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SPID) tercantum pada Bab IX Pasal 24 Peraturan Daerah

Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak untuk menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak penambangan pasir adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dalam hal melakukan kegiatan pertambangan yakni penambangan pasir tanpa memiliki izin dari pemerintah dan merusak lingkungan sekitar penambangan.

1.5.3 Tinjauan Tentang Pidana Denda

1.5.3.1 Pengertian Pidana

Menurut Sudarto pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan

nestapa.²⁴ Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera.

Selain pengertian dari Sudarto di atas terdapat pula pengertian dari sarjana yang lain, antara lain dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-raksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja di tampahkan negara kepada pembuat delik.²⁵ Pada Dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.²⁶

1.5.3.2 Jenis-Jenis Pidana

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut yaitu:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;

²⁴ Ninik Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Cetakan Pertama, h. 11

²⁵ *Ibid*, h. 12

²⁶ *Ibid*

- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;
- 2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu :

1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
2. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 27 KUHP yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.²⁷

1.5.3.3 Pengertian Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Pidana denda berasal dari kata pidana dan denda. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan

²⁷ Ibid, h. 20.

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, sedangkan denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan pidana denda adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Menurut Pasal 30 KUHP:

- a. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari, dan selama-lamanya 6 bulan.
- d. Dalam keputusan Hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun 1 hari.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.

- f. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 bulan.

Menurut Pasal 31 KUHP, bagi terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak akan mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.²⁸

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah:

1. Dalam hal pelaksanaan pidana denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bias terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
2. Pelaksanaan pidana denda diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP. Dalam putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu.

²⁸ Ibid, h. 24

Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum 1 hari dan maksimal 6 bulan.

3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sedangkan maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.²⁹

1.5.3.4 Kelemahan Dan Keuntungan Pidana Denda

1. Kelemahan pidana denda

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

- a. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri.
- b. Bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
- c. Bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
- d. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan

²⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002, Cetakan Pertama, h. 40

perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang di sita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.

2. Keuntungan Pidana denda

Disamping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu:

- a. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, etiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/ tidak dikenal. kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.
- b. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
- c. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan disamping proses pelaksanaan hukumannya lebih mudah dan murah.³⁰

1.5.3.5 Pengaturan Pidana Denda Di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Di Dalam Peraturan Daerah

1. Pengaturan Pidana Denda di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Untuk mengefektifkan pidana denda, dalam perkembangan aturan pidana diluar KUHP khususnya terhadap delik yang mempunyai nilai ekonomi tertentu, terdapat kecenderungan dalam kebijakan legislatif untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda.³¹

Akan tetapi di lain pihak, meskipun ancaman pidana denda tersebut sudah sedemikian tinggi bila dibandingkan

³⁰ Ninik Suparni, op.cit, h. 67-69

³¹ ibid, h. 78

dengan ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP akan tetapi ternyata dengan perkembangan nilai uang, masih dirasakan terlampau rendah yaitu jika dibandingkan pada saat undang-undang hukum pidana di luar KUHP tersebut dibuat. Sebagai contoh, pada saat Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat, harga emas 24 karat hanya Rp. 3000,- per gram. Denda yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi adalah maksimum Rp. 30.000.000,-. Sedangkan pada saat sekarang ternyata harga emas 24 karat adalah sekitar Rp. 500.000,- per gram, sehingga apabila dibandingkan dengan denda yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka seharusnya denda yang diancamkan sudah mencapai Rp. 5.000.000.000,-.³²

2. Pengaturan Pidana Denda Di Dalam Peraturan Daerah

Pengaturan tentang Peraturan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada bagian kedelapan, mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 45. Berkenaan dengan masalah penerapan pidana denda, kiranya perlu mendapat perhatian bunyi Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, sebagai berikut:

³² ibid, h. 79-80

- a. Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.
- c. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Selanjutnya penting pula untuk diperhatikan pasal sebelumnya yaitu Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
- b. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
- c. Peraturan ini tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.³³

1.5.4 Tinjauan Tentang Pidanaan

1.5.4.1 Pengertian Pidanaan

Usaha Profesor Jerome Hall – sebagaimana dikutip Gerber dan McAnany – dalam memberi batasan konseptual tentang pidanaan dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai mengenai konsep pidanaan. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidanaan berikut ini. Pertama, pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama Negara; ia “diotorisasikan”. Keempat, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang berancuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau

³³Ibid, h. 80-81

diringkankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya.

Sedangkan Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut:

Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehidupan (deprivation) kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Ketiga, penguasa hanya berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur 'ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang "hukuman kolektif", misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.³⁴

1.5.4.2 Teori-teori pemidanaan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (verenigins theorieen).³⁵ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Teori absolut (teori retributif), misalnya, memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang

³⁴ Teguh Prasetyo, op.cit, h.70-73

³⁵ Ibid

telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.³⁶

2. Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.³⁷

3. Teori Gabungan

Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai

³⁶ Naniek Suparni, op.cit, h. 87

³⁷ Ibid, h. 92-93

pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁸

1.5.4.3 Tujuan Pidana

Ada tujuan lain dari pidana yang secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa tujuan pidana adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sebagai suatu perbandingan dalam meninjau tujuan pidana, menurut UNAFEI, ternyata di Negara Jepang ada 5 (lima) tujuan utama pidana. Kelima tujuan tersebut adalah:

1. Pembalasan (retribution)
2. Menakut-nakuti secara umum (general deterrence)
3. Menakut-nakuti secara khusus (special deterrence)
4. Membuat tidak mampu (incapacitation)

³⁸ Ibid

5. Memperbaiki (rehabilitation).³⁹

Laporan sementara “commise – vermogenstrsffen” di Negeri Belanda menggolongkan tujuan-tujuan pembedaan sebagai berikut:

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam golongan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh yang ditujukan kepada para pelanggar hukum dan perilaku orang-orang lainnya.
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik.

Apabila tujuan pembedaan ingin ditinjau secara tepat, maka aspek peninjauan perlu dibedakan ke dalam tiga taraf aspek peninjauan, yakni dari aspek legislatif (pemberi ancaman pidana), yudikatif (penegakan ancaman pidana), dan eksekutif (pelaksana ancaman pidana).⁴⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum

³⁹ Ibid, h. 3

⁴⁰ Ibid, h. 4-5

masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.⁴¹ Karakter hukum empiris meliputi:

- a) Pendekatannya pendekatan empiris;
- b) Dimulainya dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesionernya);
- e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f) Teori kebenarannya korespondensi;
- g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.⁴²

Dari ciri-ciri pengkajian atau penelitian hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, Cetakan pertama, h. 124

⁴²Ibid, hal.125

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan ketentuan hukum positif.⁴³

1.6.2 Data

Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidak-benaran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer atau data dasar (primary data atau basic data) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁴⁴ Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

⁴³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, h. 51

⁴⁴Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta, 1986, Cetakan Ketiga, h. 12

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:
 - 1) Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya,
 - 2) Data Pribadi yang tersimpan lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
- b. Data sekunder yang bersifat publik:
 - 1) Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan,
 - 2) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - 3) Data lain yang dipublikasikan, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.⁴⁵

Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar. Di dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya di golongan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

⁴⁵ Ibid

- a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945,
 - 2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
 - c. Peraturan perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf,
 - 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
 - 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
 - 4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
 - 5) Peraturan-peraturan Daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat,
 - e. Yurisprudensi,
 - f. Traktat,
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.⁴⁶

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.

Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah:

⁴⁶ Ibid, h. 51-52

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan, (observasi) dan kuesioner.⁴⁷

2. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Pengumpulan data melalui metode kuesioner, dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara-cara:

- a. Kuesioner dikirim langsung kepada responden melalui pos, dengan harapan setelah diisi/dijawab dikirim kembali kepada peneliti.
- b. Kuesioner diserahkan kepada responden dengan cara mendatangi masing-masing responden agar mengisinya. Di sini terjadi tatap muka antara pihak peneliti dengan responden. Pihak peneliti memberi petunjuk mengenai tata cara pengisian jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada responden. Cara kedua ini dapat dilakukan secara klasikal, yang berdasarkan pengalaman lebih banyak membawa keuntungan, baik waktu, tenaga dan biaya.⁴⁸

3. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan

⁴⁷Ibid h. 12

⁴⁸Ibid, h. 54

pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden. Sesungguhnya wawancara tidak terlalu sederhana sebagaimana di bayangkankan oleh seseorang. Sebab keberhasilan wawancara tidak hanya ditentukan oleh interviewer, tetapi lebih dari itu tergantung bagaimana respondennya, situasinya, materi wawancara, waktu wawancara dan sebagainya.⁴⁹

Dalam hal ini peneliti ini akan mewawancarai beberapa narasumber diantaranya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumenep, instansi terkait penerbitan izin penambangan pasir di Kabupaten Sumenep dan LSM/Advokat.

4. Pengamatan (observation)

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial dataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.⁵⁰

1.6.4 Metode Pengolahan & Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan kecurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah

⁴⁹ Ibid, h. 57

⁵⁰ Ibid, h. 66-67

terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya menentukan analisis yang bagaimana yang ditetapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpulkan ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Dan ini memerlukan ketajaman berfikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.⁵¹

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya analisis kualitatif. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau

⁵¹ Ibid, h. 77

bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut⁵².

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila :

1. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka.
3. Hubungan antar variabel tidak jelas.
4. Sampel lebih bersifat non probabilitas
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara pengamatan.
6. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sumenep.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit, h. 192

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara kongkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktek hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian.

Kedua, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang pertama, mengenai Bentuk-bentuk pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin dengan sub bab pertama yaitu dasar hukum mengenai Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin dan sub bab kedua yaitu mengenai pelaksanaan penambangan pasir di Kabupaten Sumenep dan

sub bab ketiga yaitu analisa mengenai tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.

Ketiga, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Sumenep dengan sub bab pertama berisi identifikasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep perkara Penambangan Pasir Tanpa Izin dan sub bab kedua berisi tentang analisa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam menjatuhkan Pidana denda terhadap perkara penambangan pasir tanpa izin.

Keempat, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijaksanaan atau konsepsional sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.